

THE CRISIS OF DEMOCRACY: AN EMPIRICAL ASSESSMENT OF SUDAN AFTER THE FALL OF OMAR BASHIR

KRISIS DEMOKRASI: ASESMEN EMPIRIS TERHADAP SUDAN PASCA JATUHNYA OMAR BASHIR

Muhammad Hasan Izzurrahman^{1*}, Yon Machmudi²

¹Islamic and Middle Eastern Research Center (IMERC), Universitas Indonesia, Indonesia

² School of Strategic and Global Studies, Universitas Indonesia, Indonesia

*Corresponding author: hasanizzul@gmail.com

ABSTRACT

Article history:

Received

May 2024

Revised

June 2024

Accepted

June 2024

Keywords:

**Crisis of
democracy;
Sudan;
transitional
government;
military; civilians**

Sudan's democratic journey continues to face a long and steep road. The stepping down of President Omar Bashir in 2019 has brought the country to a condition that is increasingly far from the requirements of democracy. This research offers theoretical and empirical assessments to answer whether Sudan has experienced a democratic crisis. Through a socio-historical approach, this research will operationalize Brigitte Weiffen's concept of democratic crisis and apply it to the condition of Sudan. The research method used is qualitative and aims to explain the phenomenon of democracy in Sudan. The data analyzed comes from the author's investigations and notes conducted in the 2018-2020 period at the research location, books, journals, humanitarian agency reports, podcasts, and news. The results show that Sudan is facing a severe democracy crisis. Sudan has fulfilled all three main categories of crisis causes: democratic crisis, disharmony in the civilian coalition, weak legitimacy of the transitional government, and failure to form a government. In addition, the military and paramilitaries are present as challenger actors who continue to intervene and seek to overthrow or fundamentally change the rules of democratic governance.

ABSTRAK

Kata kunci:

**Krisis
demokrasi;
Sudan;
pemerintahan
transisi; militer;
sipil.**

Demokrasi Sudan terus menghadapi jalan terjal. Lengsernya Presiden Omar Bashir pada 2019 membawa negara itu pada kondisi yang jauh dari demokrasi. Penelitian ini mengungkapkan asesmen teoretis dan empiris untuk membuktikan krisis demokrasi yang terjadi di Sudan. Melalui pendekatan sosio-historis, penelitian ini mengoperasionalkan konsep krisis demokrasi Brigitte Weiffen dan mengaplikasikannya pada kondisi Sudan. Metode kualitatif digunakan untuk menjelaskan secara terperinci fenomena demokrasi di Sudan. Data yang dianalisis berasal dari investigasi dan catatan penulis yang dilakukan pada periode 2018—2020 di lokasi penelitian, buku, jurnal, laporan lembaga kemanusiaan, sinar, dan berita. Hasil penelitian menunjukkan Sudan menghadapi krisis demokrasi dengan tingkat serius. Sudan telah memenuhi tiga kategori utama penyebab krisis dari konsep krisis demokrasi, yaitu ketidakharmonisan di koalisi sipil, lemahnya legitimasi pemerintahan transisi, dan kegagalan membentuk pemerintahan. Selain itu, militer dan paramiliter hadir sebagai aktor penantang yang terus mengintervensi dan berusaha menggulingkan atau mengubah aturan-aturan pemerintahan demokratis.

This is an open access
article under the
[CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Sudan mengalami krisis berkelanjutan. Oktober 2021 menandai berakhirnya percobaan demokrasi selama dua tahun, setelah gerakan protes pada 2018 yang menggulingkan Presiden Omar Bashir dan berujung pada kudeta militer. Sejak awal transisi pada Juli 2019, kerangka kerja Sudan yang didukung oleh komunitas internasional untuk beralih dari pemerintahan militer ke demokrasi dianggap terlalu cepat. Kerangka kerja ini memungkinkan militer untuk mengendalikan mayoritas kekuasaan selama delapan belas bulan, sementara mereka yakin dapat menyerahkan kekuasaan kepada partai-partai sipil dalam waktu dekat. Di satu sisi, tuntutan masyarakat sipil terhadap militer meningkat untuk mempertanggungjawabkan korupsi, menghukum pelanggaran hak asasi manusia, dan menarik diri dari dominasi ekonomi Sudan.

Pemerintahan transisi yang dipimpin oleh Perdana Menteri Abdalla Hamdok telah lumpuh karena memaksa militer untuk menyerahkan kekuasaan, aset-aset yang dicuri, dan tanggung jawab atas pelanggaran di masa lalu, serta perpecahan di dalam koalisi sipil. Kelompok-kelompok politik dalam koalisi tersebut termasuk partai-partai politik di bawah *Forces for Freedom and Change* (FFC) serta kelompok-kelompok pemberontak dari daerah pinggiran yang berpartisipasi dalam pembagian kekuasaan setelah Perjanjian Perdamaian Juba 2019 (Oestericher, 2022). Ini jelas merupakan koalisi yang canggung, baik dari kelompok pemberontak maupun kelompok sipil. Kelompok pemberontak sering terlibat dalam pertempuran, sementara partai-partai sipil tidak memiliki dukungan dari basis pendukung lokal dan tidak memiliki visi politik yang jelas untuk negara. Sementara itu, militer mencoba memanfaatkan perbedaan-perbedaan ini dan memicu konflik antara kelompok-kelompok sipil (International Crisis Group, 2023).

Sejak awal proses transisi, ekonomi Sudan paling menderita karena meningkatnya utang luar negeri di bawah pemerintahan Bashir. Menyelesaikan masalah keuangan ini sangat penting karena pemerintah sipil harus dapat menunjukkan kemampuan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Sudan untuk mendapatkan legitimasi agar mereka tetap berkuasa dalam jangka panjang. Meskipun demikian, Sudan terus memburuk di bawah pemerintahan militer dalam tiga tahun terakhir. Pertikaian antara dua pemimpin militer, yaitu Jenderal Abdel Fattah al-Burhan dari *Sudan Armed Forces* (SAF) dan Mohamed Hamdan Daglo (Hemedti) dari *Rapid Support Forces* (RSF), menimbulkan kerusuhan di beberapa kota besar termasuk Khartoum. Perebutan kekuasaan ini muncul dari kekacauan politik setelah revolusi sosial dan merupakan tahap baru dalam serangkaian perselisihan domestik yang telah berlangsung lama di negara multietnis ini.

Apakah situasi saat ini di Sudan dapat dianggap sebagai krisis demokrasi? Banyaknya intervensi militer di Sudan telah menimbulkan pertanyaan tentang arah transisi demokrasi dan pembangunan di Afrika, yang mengarah pada kekhawatiran serius tentang masa depan demokrasi di negara tersebut. Studi oleh Benjamin Akwei dkk (2023) mengeksplorasi tren pengambilalihan kekuasaan oleh militer di negara-negara Afrika, termasuk Sudan, dan menimbulkan keraguan akan masa depan demokrasi di benua tersebut. Makalah itu membahas tantangan yang dihadapi demokrasi di Afrika, termasuk ketidakpuasan terhadap janji demokrasi untuk membawa kemakmuran dan mengatasi masalah sosial, ekonomi, dan politik (Akwei, Machar, & Mnyandu, 2023).

Meskipun ada banyak informasi tentang krisis demokrasi dalam wacana publik dan penelitian, konsep tersebut memiliki interpretasi yang berbeda bagi para peneliti dan sering dikacaukan dengan penyebab atau hasilnya. Makalah penelitian Brigitte Weiffen pada Kongres Dunia IPSA 2018 memperkenalkan konsep baru tentang krisis demokrasi, yang menekankan peran aktor serta faktor struktural dan institusional yang menyebabkan kerentanan terhadap krisis. Krisis demokrasi kemudian ditandai dengan adanya penantang atau agen perubahan yang berusaha menggulingkan atau mengubah secara fundamental aturan rezim demokrasi. Melalui pendekatan sosio-historis, tulisan ini akan

mengoperasionalkan konsep krisis demokrasi Brigitte Weiffen dan mengaplikasikannya pada kondisi Sudan dengan mengeksplorasi tantangan dan menilai krisis secara empiris, serta mengeksplorasi data-data yang tersedia dalam menyoroiti berbagai aspek krisis demokrasi di Sudan.

Istilah krisis sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Istilah ini melambangkan titik balik, situasi mendesak yang membutuhkan keputusan, dan biasa digunakan dalam dunia kedokteran sebelum diperkenalkan ke dunia politik (Koselleck, 2006). Krisis berkisar dari krisis bencana alam hingga krisis ekonomi. Sejak awal, konsep krisis politik masih samar-samar dan menyebar. Dalam beberapa dekade terakhir, para ilmuwan sosial jarang menganalisis faktor penentu dan dampak dari krisis politik. Sebagai contoh, krisis ekonomi terkadang dapat menyebabkan krisis politik, tetapi krisis politik juga dapat terjadi semata-mata karena alasan politik. Selain itu, batasan waktu dari fenomena yang sedang dipelajari menimbulkan masalah: kapan sebuah krisis dimulai, kapan berakhir, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tetap dianggap sebagai krisis, dan seterusnya (Weiffen, 2018).

Brigitte Weiffen (2018) kemudian menawarkan pendekatan analitis terhadap krisis demokrasi yang memisahkan fenomena krisis dari sebab dan akibatnya, dan membedakan fenomena tersebut dengan membaginya ke dalam dua kategori, yaitu endogen dan eksogen. Menurut Offe (1972, 198) yang dikutip dalam makalah Weiffen, krisis terjadi ketika struktur sistem dipertanyakan. Krisis demokrasi, dengan demikian, adalah gangguan serius terhadap struktur demokrasi yang mengancam prinsip-prinsip dasarnya. Sebuah pemerintahan demokratis mengalami krisis ketika menghadapi tantangan yang begitu berat sehingga eksistensi pemerintahan tersebut terancam. Ini berarti rezim demokratis itu sendiri yang mengalami krisis. Yang terancam dalam krisis demokrasi adalah makna demokrasi, peran lembaga-lembaga demokrasi, dan kelangsungan hidup sistem kelembagaan demokrasi. Untuk dapat dikatakan sebagai krisis demokrasi, tantangan yang dihadapi oleh sebuah rezim demokrasi haruslah sedemikian seriusnya sehingga dapat mengubah intinya atau mengancam keberlangsungannya. Tidak hanya tatanan kelembagaan demokrasi yang ditantang, peran aktor yang muncul sebagai penantang juga memiliki signifikansi yang besar (Weiffen, 2018).

Dalam penelitian mengenai demokratisasi, krisis demokrasi biasanya dikaitkan dengan isu-isu seputar struktur kelembagaan, kinerja rezim yang buruk, atau menurunnya legitimasi rezim. Dalam menjelaskan terjadinya krisis demokrasi, penting untuk membedakan antara tantangan, penyebab, krisis, dan krisis itu sendiri (Merkel, 2014). Secara umum, negara-negara demokrasi saat ini dihadapkan pada tantangan-tantangan yang kompleks seperti kesenjangan sosial-ekonomi yang menantang prinsip-prinsip demokrasi dalam hal partisipasi dan representasi yang setara, globalisasi ekonomi, dan sebagai respons terhadap ancaman terorisme, konflik antara keamanan kolektif dan hak-hak kebebasan individu pun muncul.

Faktor-faktor utama yang menyebabkan krisis termasuk ketidakcukupan dalam struktur kelembagaan yang menghambat penyelesaian masalah, kinerja yang tidak memuaskan dalam menemukan solusi, dan berkurangnya dukungan terhadap rezim (Weiffen, 2018). Meskipun faktor-faktor ini disebut sebagai penyebab krisis demokrasi, namun faktor-faktor tersebut tidak sama dengan krisis. Dalam penelitian Weiffen, faktor-faktor ini bukanlah faktor penentu tunggal, tetapi bersama-sama membentuk kerentanan terhadap krisis. Semua negara demokrasi berisiko mengalami krisis ketika dihadapkan pada berbagai tantangan, tetapi terutama negara demokrasi baru (yang kurang stabil) cenderung lebih sering mengalami krisis.

Aktor diperlukan sebagai elemen tambahan untuk menciptakan krisis. Krisis hanya akan terjadi jika para aktor yang terlibat mengambil tindakan yang relevan dalam situasi yang memiliki kerentanan tinggi. Hal ini hanya terjadi jika krisis tersebut menghasilkan aktor-aktor dengan sumber daya yang mampu dan mau menantang sistem yang ada saat ini

secara strategis. Aktor-aktor ini dapat berupa tindakan yang berani, pihak-pihak yang menentang sistem, tentara, bahkan pasukan paramiliter (Weiffen, 2018). Dampak dari krisis demokrasi dapat menyebabkan ketidakstabilan dan menurunnya konsolidasi dalam demokrasi. Namun, krisis dapat dianggap sebagai titik balik yang mengganggu jalannya peristiwa untuk memulai perubahan rezim, dan dapat dilihat sebagai proses yang mempengaruhi perkembangan demokrasi dari waktu ke waktu yang menghasilkan perubahan kecil dan bertahap dalam tingkat demokrasi (Margolis, 2010).

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menginvestigasi fenomena sosial secara rinci (Creswell & Creswell, 2014). Penelitian kualitatif melibatkan penggunaan teknik-teknik penyelidikan untuk mengumpulkan data kualitatif dan non-numerik untuk menjelaskan, menginvestigasi, memahami, dan mendeskripsikan fenomena sosial secara komprehensif. Data primer dianalisis dari hasil investigasi dan catatan penulis selama periode 2018-2020 di lokasi penelitian. Sumber data lain dari buku, jurnal, laporan dari lembaga internasional, podcast, dan berita digunakan untuk analisis yang lebih komparatif dan mendalam. Setelah data terkumpul, metode yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan awal, verifikasi, dan kesimpulan akhir untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu apakah Sudan mengalami krisis demokrasi.

PEMBAHASAN

Akar Krisis Demokrasi di Sudan

Inti dari revolusi Sudan adalah pertarungan antara pemberontakan rakyat dan Bashir. Sejak berkuasa pada tahun 1989, mayoritas rakyat Sudan tidak begitu menyukai Bashir, terutama mereka yang berada di belakang pemerintahannya. Protes yang diorganisir oleh kelompok-kelompok lokal yang muncul di berbagai daerah segera diorganisir dengan koordinasi *Sudanese Professionals Association* (SPA), yang menyusun tuntutan reformasi ke dalam sebuah kerangka kerja yang dapat menjatuhkan seorang diktator. Kisah pemberontakan sipil di Sudan memiliki asal mula yang mudah. Para pengunjung rasa sangat antusias dengan perubahan yang mereka gambarkan.

Selama masa pemerintahannya, Bashir bersama rezimnya yang terdiri dari pasukan militer dan keamanan mulai menyadari bahwa ancaman utama datang dari masyarakat sipil yang terkoordinasi. Langkah pertama yang dilakukan adalah membubarkan serikat pekerja independen dan asosiasi profesional (Berridge, *Civil Uprisings in Modern Sudan: The 'Khartoum Springs' of 1964 and 1985*, 2015). Protes rakyat mulai meletus di kota-kota utara, setelah CPA dan pelarangan partai politik, selama pekan-pekan referendum di Sudan Selatan. Pada Januari 2011, setelah 55 tahun menjadi warga negara kelas dua, rakyat Sudan Selatan memutuskan untuk merdeka. Hal ini merupakan penghinaan terhadap kepemimpinan dan pukulan ekonomi yang berat, karena wilayah selatan menguasai 75 persen cadangan minyak negara tersebut. Bashir dan rezimnya khawatir akan pergolakan ekonomi akibat hilangnya pendapatan minyak di Khartoum, sementara pemberontakan berskala besar terjadi di beberapa negara Timur Tengah, insiden *Arab Spring*. Pemerintah Sudan memadamkan demonstrasi dengan kebijakan ekonomi yang tidak masuk akal, seolah-olah mereka masih memiliki kekayaan minyak dan mempertahankan gandum dan bahan bakar bersubsidi (Young, 2012).

Ketika Sudan Selatan merdeka, pemerintah harus menahan pengeluarannya. Bashir menyadari konsekuensi yang mungkin terjadi, sehingga ia sebisa mungkin menghindarinya (Patey, 2023). Pada September 2013, putaran pertama langkah-langkah penghematan diperkenalkan oleh pemerintah. Seperti yang sudah diperkirakan, para pelajar, pemuda, pekerja yang tergabung dalam serikat pekerja, dan asosiasi profesional mulai melakukan protes seperti biasa. *National Intelligence and Security Service* (NISS) telah siap dengan bahan-bahan yang cukup untuk mengubah protes politik menjadi kekacauan besar. Salah satu strategi yang digunakan adalah menyusupkan agen provokator di antara para

pengunjuk rasa, yang nantinya akan memecahkan jendela toko dan menyalakan api di pom bensin, sehingga menciptakan ketegangan di antara penduduk kota. Strategi lainnya adalah dengan menggunakan kepercayaan diri generasi muda yang berlebihan terhadap media sosial untuk menyebarkan informasi palsu yang berbahaya. Demonstrasi tersebut ditumpas dengan kekerasan yang mematikan, menyebabkan lebih dari 200 orang tewas (Amnesty International, 2013).

Pada tahun 2018, ekonomi Sudan mengalami penurunan yang signifikan sementara manajemen kilang minyak Khartoum sangat buruk dan korup, menyebabkan Sudan harus mulai mengimpor bahan bakar olahan. Anggaran pendidikan dan kesehatan pun hanya sepertiga dari anggaran militer pada tahun itu. Pada musim panas tersebut, serikat pekerja bergabung ke dalam SPA dengan tujuan yang jelas untuk meningkatkan upah minimum (Berridge, Lynch, Makawi, & Waal, 2022). Demonstrasi spontan terhadap pemerintah dimulai beberapa minggu setelahnya pada tahun 2018. Protes dimulai di kota ad-Damazin pada 13 Desember, dengan hanya beberapa puluh orang. Para pengunjuk rasa memblokir jalan dari Sinnar ke Sinja. Mereka ditangkap oleh aparat keamanan dan dipenjara. Protes semacam ini tidak hanya terjadi di Sudan, tetapi terjadi hampir setiap minggu di beberapa daerah di negara tersebut (Hassan & Kodouda, 2019). Rasa frustrasi telah mencapai titik didih terendah setelah bertahun-tahun terpendam.

Pada 19 Desember 2018, protes yang lebih besar terjadi di Atbara, sebelah utara Khartoum. Atbara adalah titik bersejarah bagi gerakan buruh di Sudan, pusat operasi Kereta Api Sudan dan markas besar serikat pekerja kereta api, yang sebelumnya dikendalikan oleh Partai Komunis Sudan (Sikainga, 2002). Mereka memilih untuk menggunakan simbol sepotong roti, karena harga roti yang tidak masuk akal. Di tempat tersebut, para pengunjuk rasa mulai membakar kantor pusat *National Congress Party* (NCP). Kantor-kantor yang dibakar tersebut melambangkan sebuah kota yang telah "dibebaskan". Berita tentang protes tersebut menyebar melalui platform media sosial di seluruh Sudan. Beberapa hari kemudian, terjadi protes tambahan di Port Sudan, Dongola di Utara, al-Damar, Berber, dan Sinnar, yang kemudian menyebar ke bagian lain kota (Berridge, Lynch, Makawi, & Waal, 2022).

Setelah lebih dari empat bulan aksi demontsrasi, pada 10 April 2019, Bashir digulingkan dengan cepat dan tanpa pertumpahan darah oleh semua letnan senior yang bergerak serempak. Pemberontakan ini dipimpin oleh orang yang paling setia kepada Bashir, Menteri Pertahanan yang juga mantan Wakil Presiden Pertama Letnan Jenderal Ahmad Awad Ibn Auf. Sebagai Ketua Dewan Militer Tinggi, Ibn Auf mengorganisir pertemuan dengan semua pejabat senior di bidang militer, keamanan, dan kepolisian. Hanya dua orang yang dapat menghentikan kudeta tersebut, keduanya berpangkat letnan jenderal meskipun tidak memiliki pelatihan militer formal, yaitu Salah Abdalla Gosh, Direktur NISS, dan Hemedti, komandan RSF. Meskipun demikian, keduanya setuju dengan kudeta tersebut (Izzurrahman & Basyar, 2022). Sifat khas dari sistem politik Sudan yang terpusat dan patrimonial – yang diatur oleh kesepakatan transaksional di tingkat elit, adalah bahwa masa jabatan terakhir seorang diktator adalah masa yang paling berbahaya.

Kegagalan dan Lemahnya Legitimasi Koalisi Sipil

Sejak awal, SPA berusaha mengubah pengorganisasian massa mereka menjadi sebuah bentuk representasi politik. Ketika Bashir jatuh, hal ini menandai puncak dari SPA, sebagai kepemimpinan sebuah gerakan rakyat. Beberapa individu dalam SPA percaya bahwa mereka harus memimpin dalam bernegosiasi dengan militer dan menetapkan jadwal politik. Tetapi yang lain berpendapat bahwa SPA harus bermitra dengan FFC (International Crisis Group, 2023). Masalahnya adalah bahwa SPA tidak memiliki struktur yang terorganisir sebagai entitas politik. Beberapa anggota terkemukanya adalah politisi senior dan berpotensi menghadapi konflik kepentingan dan loyalitas yang terpecah. Menurut mereka, memasuki dunia politik resmi akan melanggar mandat awal SPA. Maka, SPA

memilih untuk bergabung dengan FFC sebagai mitra junior dan menyerahkan proses negosiasi kepada kelompok yang lebih besar. Ini adalah momen yang sangat penting. Tidak ada wajah tunggal dari kawan-kawan revolusioner (Berridge, Lynch, Makawi, & Waal, 2022).

Meskipun partai-partai politik di FFC memiliki pemimpin-pemimpin yang terkenal, tidak ada yang lebih unggul. Omar al-Digair, pemimpin Sudan Congress Party (SCP) yang telah menjadi oposisi selama pemerintahan Bashir, muncul sebagai ketua FFC. Namun, beberapa anggota inti SPA percaya bahwa tokoh-tokoh oposisi seperti al-Digair telah tercemar. Meskipun demikian, al-Digair pernah ditangkap setelah demonstrasi dimulai pada Desember 2018. Saat berada di penjara menjelang akhir Februari 2019, ia dikunjungi oleh Salah Gosh. Pertemuan mereka tidak pernah dipublikasikan dan al-Digair dibebaskan pada Maret 2018 dengan tekad untuk melanjutkan aksi demonstrasi dan penentangan atas rezim.

Pada 27 April 2019, *Transitional Military Council* (TMC) memulai proses pembukaan negosiasi. Al-Digair mendapat dukungan dari para pengusaha terkemuka. Anggota SCP, seperti Khalid Omar Yousif, dipercayakan untuk memainkan peran penting dalam kepemimpinan SPA atau FFC. Tugas Al-Digair adalah untuk membahas masalah kurangnya legalitas dengan para peserta demonstrasi SPA dan menyatukan FFC. Diskusi dimulai di sebuah lokasi tersembunyi yang berdekatan dengan pangkalan militer. Kekuatan FFC pada awal negosiasi terletak pada anggotanya yang mewakili hampir seluruh spektrum politik. Hal ini juga dapat dianggap sebagai kelemahannya karena kepentingan yang sangat bervariasi dan kurangnya mekanisme penyelesaian konflik. Anggota oposisi, baik di dalam FFC maupun di luarnya, bergerak bebas. Beberapa di antaranya masuk dan keluar dari jabatan junior ketika rezim Islamis-NCP membuat kesepakatan dengan faksi-faksi tertentu, sementara yang lain menolak untuk berkomitmen karena alasan prinsip atau tidak ada tawaran yang diberikan (Berridge, Lynch, Makawi, & Waal, 2022).

Beberapa partai terpecah, memisahkan diri dari partai-partai yang lebih tua karena konflik internal yang diakibatkan oleh ambisi individu, sementara partai-partai lainnya tetap eksis berkat dedikasi sekelompok kecil veteran yang memelihara visi mereka. Partai Persatuan Demokratik telah terpecah menjadi tujuh aliran yang berbeda (Alaqqam, 2020). Salah satu kelompok yang menonjol, *Democratic Unionist Party* (DUP) di bawah kepemimpinan Khatmiyyah Muhammad Utsman al-Mirghani, mewakili anggota serikat pekerja yang diserap oleh pemerintah pada 2011 ketika putra al-Mirghani, Jafa'ar al-Sadiq, ditunjuk sebagai 'asisten presiden', dan tidak bergabung dengan FFC ketika didirikan. Faksi yang bergabung dengan FFC, '*opposition unionist group*', dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Ali Mahmoud Hassanein, seorang veteran Intifada 1985 (Idris, 2019). Beberapa partai sipil memiliki struktur terpusat dan dipimpin oleh satu orang, sementara yang lain hampir tidak bisa disebut 'partai' karena mereka lebih mirip dengan kelompok sosial atau kelompok diskusi. Mereka tidak memiliki kekuasaan yang signifikan atau harus membuat keputusan politik secara langsung selama setidaknya 30 tahun atau lebih (Berridge, Lynch, Makawi, & Waal, 2022). Bagi al-Digair dan FFC, mencapai konsensus hampir tidak mungkin.

Sementara itu, FFC juga terdiri dari sejumlah pemberontak bersenjata di Darfur, Kordofan selatan, dan Blue Nile. Para anggotanya tidak ikut serta dalam demonstrasi, sementara para pemimpinnya berada di luar kota atau di negara-negara tetangga, bukan di Khartoum. Perwakilan dari masyarakat sipil progresif dan perwakilan perempuan, termasuk Mariam al-Sadiq al-Mahdi dari delegasi *Ummah Party*, juga hadir. Seperti SPA, FFC juga bersifat konsensus tetapi kurang efektif. Setiap anggota kelompok memiliki partisipasi dalam negosiasi dan keanggotaan komite, tetapi tidak ada prosedur yang jelas untuk proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, masalah yang muncul adalah setiap pertemuan tidak menghasilkan apa-apa, tidak ada yang memimpin, proses pengambilan keputusan berjalan lambat, dan perselisihan pribadi yang kecil sering kali menghalangi (International Crisis Group, 2023). Pada akhirnya, al-Digair tidak memiliki waktu untuk

mengoordinasikan FFC, di lain sisi *Sudan Communist Party* mengambil pendekatan yang paling ekstrem dengan menuntut agar militer segera menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan sipil.

Para jenderal dengan cepat merasakan perpecahan di antara warga sipil dan mengeksploitasinya. Waktu berpihak pada militer: yang perlu mereka lakukan hanyalah memainkan politik penundaan. FFC berhenti bernegosiasi pada 21 April 2019 karena ketidaksepakatan atas isi utama kompromi. Mereka melanjutkan kegiatan itu pada 13 Mei 2019 dan menghentikannya dua hari kemudian setelah kerusuhan pecah antara demonstran dan tentara di sekitar lokasi protes. Pada saat yang sama, pembicaraan tidak resmi terus berlangsung, dan seorang perwira militer menyarankan kepada al-Digair untuk mengusulkan keseimbangan yang adil antara jumlah tentara dan warga sipil dalam 'dewan kedaulatan' yang akan memimpin negara dan kepala badan tersebut harus mengalir. Menurut Berridge et al (2022) dalam buku mereka, konsep kepresidenan kolektif telah diakui di Sudan dalam setiap periode transisi dan demokrasi sejak 1950-an, tetapi dewan kedaulatan historisnya tetap bersifat sipil.

Dewan Kedaulatan bertujuan untuk mengurangi kekuasaan nyata dan simbolis dari setiap pemimpin negara. Ada ketidaksepakatan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Beberapa negosiator mengklaim bahwa al-Digair kemudian mengusulkan ide tersebut tanpa memberi tahu para pemimpin FFC lainnya ketika negosiasi dilanjutkan. Koalisi sipil sangat marah. Namun, al-Digair dan seorang anggota partainya mengatakan bahwa tawaran tersebut telah disetujui oleh para negosiator sipil FFC (Berridge, Lynch, Makawi, & Waal, 2022). Meskipun kebenarannya belum diketahui, hal ini menunjukkan betapa mudahnya warga sipil terpecah belah dalam negosiasi oleh para perwira militer yang terampil dalam tawar-menawar dan pengambilan keputusan yang kejam. Meskipun demikian, kedua belah pihak tidak dapat mencapai kesepakatan. Perundingan tidak berhasil. Ketika berita bahwa al-Digair mengusulkan pergantian pemimpin sipil dan militer di dewan kedaulatan menyebar, para pengunjuk rasa yang melakukan aksi duduk dengan antusias menyatakan ketidaksetujuan mereka (International Crisis Group, 2023).

Guna mendapatkan kembali dorongan revolusioner, FFC mempromosikan kampanye pembangkangan sipil. Namun, di mata banyak orang yang terlibat dalam aksi duduk dan serikat buruh, FFC telah kehilangan legitimasi dan menukar revolusi dengan kepentingan para anggotanya. Tidak ada tanggapan terhadap seruan pembangkangan sipil. Peristiwa revolusioner telah berakhir. TMC menjadi semakin berperan sebagai pemerintah (International Crisis Group, 2023). Pada saat yang sama, para jenderal mulai merencanakan konferensi untuk para pemimpin suku. Hemedti adalah tokoh yang paling menonjol. Dia secara pribadi memberikan setiap kepala suku sebuah kendaraan sebagai bentuk kepercayaan mereka terhadap TMC. Selain itu, Hemedti juga membayar tunggakan gaji polisi dan guru sesuai dengan haknya (Berridge, Lynch, Makawi, & Waal, 2022).

Destabilisasi dan Dekonsolidasi antar Aktor-aktor

Menghadapi situasi di Sudan, sebuah kelompok *ad hoc* yang terdiri dari berbagai negara dan organisasi seperti Uni Afrika, *Intergovernmental Authority on Development* (IGAD), Amerika Serikat, Inggris, Arab Saudi, dan UEA, berkolaborasi untuk mencapai kesepakatan yang dirundingkan antara pihak militer dan sipil, yaitu TMC dan FFC. Upaya mereka dimulai pada bulan Mei dan berpuncak pada penandatanganan Deklarasi Konstitusi pada bulan Agustus 2019. Dalam pertemuan tersebut, TMC dan FFC hadir, dan mereka bertujuan untuk berbagi kekuasaan untuk mencapai penyelesaian yang komprehensif. Perdana Menteri Etiopia Abiy Ahmed memilih untuk mengambil tindakan secara pribadi. Ia semakin yakin bahwa dirinya memiliki peran sebagai mediator dan yakin bahwa pesona dan motivasi pribadinya akan membawa kedua belah pihak mencapai kesepakatan (Berridge, Lynch, Makawi, & Waal, 2022).

FFC dan TMC memulai diskusi kembali pada bulan April 2019, menetapkan struktur

dan agenda mereka. Para jenderal yang berkuasa tentu saja ingin tetap memegang kendali. Mohamed Yousif, dari SPA, mengeluhkan tekanan dari negara-negara Barat untuk lebih fleksibel dan menerima kompromi (International Crisis Group, 2023). Pada saat yang sama, Sadiq al-Mahdi memberikan pujian terbuka kepada Hemedti dan TMC, serta mendesak kelompok-kelompok sipil lainnya untuk tidak melaksanakan rencana mereka untuk mendorong militer mundur melalui pemogokan massal (Al Jazeera, 2019). Kesenjangan ideologis inilah yang menyebabkan opini yang kuat dari masing-masing pihak. FFC berangsur-angsur pecah; perbedaan pandangan muncul ke permukaan. Jurang pemisah antara demonstran dan negosiator semakin besar.

Masalah terbesar adalah kurangnya organisasi internal dalam upaya FFC untuk bernegosiasi dengan pihak militer. Terdapat variasi tujuan dan taktik yang jelas di dalam setiap kelompok di FFC. Yang paling menonjol adalah adanya berbagai versi rancangan perjanjian yang disebarikan oleh para negosiator sipil yang menyebabkan kekecewaan di kalangan masyarakat umum. Agenda-agenda yang berbeda tersebut tidak dapat dipertemukan kecuali dengan membuat kesepakatan pragmatis, yaitu dengan mengambil posisi jalan tengah. Sementara itu, negosiasi terus berlanjut. Revolusi April berlanjut hingga Mei. Setelah dua minggu berkomunikasi melalui siaran pers, kedua belah pihak kemudian bertemu langsung pada tanggal 13 Mei 2019 di markas militer untuk menegosiasikan transisi selama tiga tahun. Namun, masih ada beberapa elemen penting yang belum terselesaikan, terutama komposisi Dewan Kedaulatan. Meskipun aksi duduk masih berlangsung, jumlah peserta aksi telah berkurang dari ratusan ribu menjadi puluhan ribu. Semakin lama negosiasi berlanjut, semakin rentan warga sipil.

Sementara itu, bagian paling penting dari rencana militer adalah melemahkan sipil. Pada awalnya, mereka tidak menganggap aksi duduk sebagai masalah, namun setiap hari pembatasan semakin ketat. Pasukan dari RSF mulai mengganggu aksi duduk, yang memuncak ketika mereka secara langsung menyerbu kamp. Pada malam hari tanggal 15 Mei 2019, terjadi serangan oleh milisi RSF terhadap para sukarelawan yang menyediakan keamanan di luar aksi duduk. Pada malam hari, para pengunjuk rasa mengumpulkan batu bata dan membangun barikade untuk melindungi daerah tersebut. Pusat kota Khartoum tampak seperti kota yang dikepung dengan parit dan barikade sebagai pertahanan darurat. Suasana aksi protes juga berubah. Suasana yang tadinya meriah dan seperti festival berubah menjadi situasi yang lebih mencekam (International Crisis Group, 2023).

Pada 20 Mei 2019, Hemedti memerintahkan pembubaran demonstrasi aksi duduk, dan memerintahkan pasukan RSF untuk mengusir para peserta aksi (BBC, 2019). Pada 3 Juni 2019, ribuan polisi dan anggota paramiliter RSF berkumpul di sekitar aksi duduk sambil membawa senjata. Pada pukul 5 pagi keesokan harinya, polisi dan RSF menembaki para pengunjuk rasa, merangsek masuk lebih dalam, mengejar, dan menjebak mereka. Para pengunjuk rasa berhamburan. Para aktivis berlari ke rumah sakit untuk menyelamatkan diri. Anggota junta menyerang orang-orang di dalam bangsal rumah sakit. Mayat-mayat di rumah sakit ditutupi dengan bendera Sudan. Sementara itu, pasukan militer diarahkan untuk tetap berada di barak mereka dan membiarkan pasukan Hemedti melanjutkan aksinya. Berita mengenai kasus kekerasan seksual sering kali mengungkapkan dan menakutkan. Lebih dari 200 orang tewas, ratusan diperkosa atau terluka, dan puluhan lainnya hilang (Human Right Watch, 2019).

Setelah ada tekanan dari internasional, pada pertengahan Juli 2019, para negosiator militer dan FFC menyepakati rencana kerja untuk membentuk pemerintahan koalisi. Mengikuti formula Uni Afrika, rencana Deklarasi Konstitusi memiliki jumlah perwakilan sipil dan militer yang sama di Dewan Kedaulatan - sebuah lembaga kepresidenan kolektif yang sesuai dengan tradisi rezim parlementer Sudan sebelumnya. Seorang pemimpin dari masing-masing pihak akan bergantian menjadi pemimpin negara selama 18 bulan. Seorang perdana menteri sipil akan ditunjuk. Ketika pertama kali dipublikasikan, kerangka acuan dewan tersebut memberikan peran kehormatan kepada sayap militer tanpa kekuasaan

eksekutif. Meskipun demikian, perjanjian tersebut menjanjikan pembagian yang adil untuk posisi-posisi puncak antara sipil dan militer. Sebuah badan legislatif sementara telah direncanakan, dengan anggota FFC dan juga partai-partai politik lain yang ikut bergabung. Setelah Deklarasi Konstitusi ditandatangani pada tanggal 17 Agustus, pemerintahan baru sudah mulai terlihat. Yang menarik di sini adalah bukan Burhan yang menandatangani TMC, melainkan Hemedti (Berridge, Lynch, Makawi, & Waal, 2022).

Pemerintah transisi mulai menjabat pada 19 Agustus 2019. Abdalla Hamdok, yang bukan seorang politisi profesional melainkan pensiunan teknokrat, terpilih sebagai Perdana Menteri dan kabinet oleh FFC, yang didukung oleh gerakan rakyat. Dia sebelumnya menjabat sebagai Wakil Sekretaris Eksekutif Komisi Ekonomi untuk Afrika di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Prioritas Kabinet Hamdok adalah menghentikan perang, membangun perdamaian, menangani krisis ekonomi, membatalkan undang-undang yang membatasi kebebasan, meningkatkan hak-hak perempuan, mereformasi lembaga-lembaga negara, menyusun kebijakan luar negeri yang seimbang, meningkatkan kesadaran sosial dan pembangunan, meningkatkan peran pemuda, menyelenggarakan konferensi konstitusional, dan memerangi korupsi. Tujuannya adalah untuk mengimplementasikan semua ini dalam jangka waktu 200 hari (Xinhua, 2019).

Sejak awal masa jabatannya, pemerintahan transisi berada dalam keadaan sulit. Perdana menteri dan anggota kabinetnya berada di puncak hirarki pemerintahan yang tidak mereka kendalikan. Mereka harus berkolaborasi dengan para birokrat di kementerian yang simpatisan NCP serta para jenderal yang memiliki kendali atas persenjataan dan keuangan. Militer dan RSF sibuk mengambil alih kendali semi-rahasia yang diwarisi dari NISS dalam bisnis terlarang, sambil tetap mengendalikan jaringan korporat mereka sendiri. Yang paling berbahaya adalah kemampuan mereka untuk menggunakan kekerasan, baik secara terang-terangan maupun terselubung, untuk mencapai keinginan mereka. Meskipun tidak terlihat oleh publik, para pemimpin SAF, termasuk Burhan, sangat meragukan paramiliter dan menganggap mereka sebagai ancaman langsung terhadap posisi dan kekuasaan mereka. Namun, Hemedti hanya dapat bergantung pada pasukannya sendiri untuk keselamatannya dan tidak dapat memperoleh pengakuan di Khartoum atau secara internasional. Konflik antara Burhan dan Hemedti, antara SAF dan RSF, menjadi tantangan penting namun sulit untuk diatasi oleh Hamdok. Meskipun ia tidak dapat memecah belah kedua jenderal tersebut, ia harus memastikan adanya triangulasi di antara mereka.

Pada Januari 2020, menjadi jelas bahwa posisi politik Hamdok sangat tidak aman. Sejumlah petugas keamanan yang marah karena unit mereka dibubarkan terlibat dalam pertempuran jalanan selama berhari-hari dengan militer, menciptakan kekacauan di ibu kota. Rumor kudeta terhadap perdana menteri di Sudan berubah dari pembicaraan politik yang tenang menjadi gebrakan. Dan yang paling mengkhawatirkan, Hamdok sendiri menjadi sasaran. Sebuah bom yang diletakkan di pinggir jalan meledak di dekat kendaraannya. Itu adalah sebuah percobaan pembunuhan, meskipun tidak berhasil. Pada Mei 2020, partai-partai politik seperti *National Ummah Party* (NUP), Partai Ba'athist, SCP, dan sebuah faksi dari *Unity Party* (UP) bergabung untuk menggulingkan anggota kabinet Hamdok, terutama menteri keuangan Elbadawi, yang secara aktif memperjuangkan reformasi subsidi (Berridge, Lynch, Makawi, & Waal, 2022). Kesepakatan antara SPA dan FFC telah terganggu, disertai dengan ketidaksepakatan mengenai karakter praktik revolusioner di kalangan kaum kiri Sudan.

Pemerintahan teknokratis yang dipimpin oleh Hamdok terhenti pada akhir tahun 2020. Krisis ekonomi semakin dalam, reformasi gagal, dan bantuan keuangan internasional tidak pernah direalisasikan. Kemudian, militer memperbarui beberapa bagian dari Perjanjian Damai Juba untuk melemahkan otoritas perdana menteri. Pada 25 Oktober 2021, Burhan segera mengumumkan bahwa militer telah mengambil alih pemerintahan dan menangkap Hamdok dan beberapa pemimpin sipil. Alih-alih menyebutnya sebagai kudeta, Burhan menggambarkan tindakannya sebagai perbaikan proses transisi yang sejalan

dengan Deklarasi Konstitusi. Ini adalah keempat kalinya Sudan mengalami pola pergantian pemerintahan militer dan sipil, sejak hampir tujuh puluh tahun yang lalu. Kisah yang sedang dibentuk pasti sudah tidak asing lagi bagi generasi yang lebih tua. Sudan telah mengalami lebih banyak kudeta dan upaya kudeta dibandingkan dengan negara-negara lain di Afrika (McGowan, 2003). Selain itu, ini bukanlah pemberontakan atau upaya kudeta pertama yang terjadi sejak Bashir berkuasa. Semua orang menyadari siklus pemberontakan sipil, kerapuhan demokrasi, kekecewaan rakyat, dan kudeta militer. Semua pemberontakan sebelumnya telah terjadi terhadap pemerintah parlementer, dengan semua melibatkan warga sipil dan ideologi.

Kudeta atas pemerintahan transisi mendapatkan kecaman keras dari masyarakat Sudan. Sempat menjadi tahanan rumah, Hamdok kemudian mencapai kesepakatan dengan militer pada 21 November 2021, yang mengembalikannya sebagai perdana menteri. Namun keadaan tetap tidak stabil. Protes meluas terhadap kesepakatan yang dibuat pada bulan November. Pada Januari 2022, Hamdok mengundurkan diri, dan militer menangkap kembali para pemimpin sipil pada bulan berikutnya. Pada Juli 2022, Burhan memberhentikan sebagian besar anggota sipil Dewan Kedaulatan yang dipilihnya sendiri setelah kudeta Oktober 2021, dan membentuk Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata untuk mengelola keamanan dan pertahanan negara. Burhan juga berjanji bahwa militer akan menjauhkan diri dari urusan politik. Tidak ada keputusan yang dibuat berdasarkan otoritas konstitusional yang sah, sementara militer masih mengendalikan kekuasaan (Eltayeb, 2022).

Di bawah kepemimpinan Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata, Sudan tidak mengalami perubahan positif yang dijanjikan oleh Burhan ketika menggulingkan pemerintahan transisi. Pada April 2023, Sudan dikejutkan dengan bentrokan antara Burhan dan Hemedti. Konflik ini bermula ketika Sudan sudah mengalami krisis kemanusiaan akibat gejolak politik dan kerawanan pangan. Menurut perkiraan konservatif dari *Armed Conflict Locations & Events Data Project (ACLED)*, hampir 5.000 orang telah terbunuh. Lebih dari 14 juta anak membutuhkan bantuan kemanusiaan dan lebih dari empat juta orang telah melarikan diri dari pertempuran. PBB dan kelompok-kelompok hak asasi manusia menuduh militer dan RSF telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia (Bereketeab, 2023). Pada saat penulisan penelitian ini, kesepakatan damai antara kedua faksi bersenjata belum selesai.

Sebelum kudeta Oktober 2021, Hamdok mengatakan bahwa keputusan politik tetap menjadi faktor penentu nasib revolusi Sudan (Lynch & Gramer, 2021). Di bawah kepemimpinan Bashir, pemerintahan berbasis transaksi merasuki setiap aspek kehidupan politik. Bahkan pemerintahan sipil yang lebih kuat dan lebih mampu tidak dapat memberantas hal ini. Penerapan demokrasi maupun pertumbuhan ekonomi tidak dapat dengan cepat menghilangkan korupsi dalam politik. Anggota militer, yang tetap memegang kendali atas kekuasaan yang melebihi kewenangan mereka, paling memahami bagaimana sistem bayangan ini beroperasi. Ada sebuah lelucon lama tentang politik Sudan yang menyatakan bahwa meskipun politik Sudan berubah setiap minggu, hasilnya tetap konsisten setelah sepuluh tahun. Hal ini menunjukkan kekacauan yang merupakan ciri khas politik Sudan, bahwa keadaan normal adalah ketidakstabilan, dan tidak ada solusi politik yang pasti, melainkan negosiasi politik yang tidak stabil. Dalam keadaan terbaiknya, politik Sudan adalah diskusi yang hidup, melibatkan masyarakat sipil, dan terus menerus terbuka tentang identitas nasional dan keputusan yang akan diambil oleh pemerintah dan rakyat. Dalam kondisi terburuknya, politik Sudan tidak dapat ditoleransi, serakah, dan kejam.

KESIMPULAN

Situasi yang terjadi di Sudan saat ini dapat dinilai sebagai bentuk krisis demokrasi yang tinggi. Berdasarkan tiga kategori utama penyebab krisis dari konsep krisis demokrasi yang dikemukakan Weiffen, Sudan telah memenuhi semuanya. Koalisi Sipil gagal

membentuk pemerintahan sipil dan desain institusional setelah penggulingan mantan Presiden Bashir. Pemerintahan transisi sipil juga dinilai tidak berjalan dengan baik karena beberapa hal, seperti ketidakharmonisan antara kubu-kubu yang tergabung dalam koalisi besar sipil dan intervensi militer yang menguasai sebagian besar sumber daya. Dengan demikian, pemerintahan sipil tidak memiliki kekuatan legitimasi di masyarakat sipil apalagi militer untuk menjaga Sudan sebagai negara demokratis. Selain itu, krisis demokrasi ditandai dengan adanya penantang atau agen perubahan yang berusaha menggulingkan atau mengubah secara mendasar aturan-aturan rezim demokratis. Di Sudan, para penantang ini adalah para pemimpin militer dan paramiliter, Burhan dan Hemedti, yang terlibat dalam perebutan kekuasaan yang mengancam prinsip-prinsip dasar demokrasi. Efeknya adalah destabilisasi dan dekonsolidasi tanpa henti di antara para aktor. Dan pada akhirnya, varian krisis demokrasi di Sudan dapat dikategorikan sebagai endogen dan eksogen. Eksogen karena kudeta, percobaan kudeta, ancaman kudeta dari militer, protes massa, dan pengunduran diri secara paksa. Sedangkan endogen karena penindasan, manipulasi oleh militer, konflik antar sipil-militer, dan perubahan konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akwei, B., Machar, B. A., & Mnyandu, P. (2023). 'Debris' of Coup D'état: Electoral Democracy, Election Violence, Political Vigilantism, and Elections Securizations in Africa. *South Asian Research Journal of Humanities and Social Sciences*, 5(3), 65-75.
- Al Jazeera. (2019, May 26). *Hizb al-Sadiq al-Mahdi yarfuld al-da'wa li'l-idrab al-aam*. Dipetik April 20, 2024, dari Al Jazeera.net: <https://www.aljazeera.net/politics/2019/5/26/حزب-الأمة-الصادق-المهدي-إضراب-عام-قوى>
- Alaqam, A. (2020, July 9). *Kharij iqaa al-'asr*. Dipetik April 20, 2024, dari Sudan Post: <https://www.sudanpost.info/كلام-عابر-بقلم-عبدالله-علقم-خارج-إيقا/>
- Amnesty International. (2013, October 2). *Sudan escalates mass arrests of activists amid protest crackdown*. Dipetik April 20, 2024, dari Amnesty International: <https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2013/10/sudan-escalates-mass-arrests-activists-amid-protest-crackdown/>
- BBC. (2019, July 12). *Sudan's livestream massacre*. Dipetik April 20, 2024, dari BBC: <https://www.bbc.com/news/av/world-africa-48956133>
- Berridge, W. (2015). *Civil Uprisings in Modern Sudan: The 'Khartoum Springs' of 1964 and 1985*. London: Bloomsbury.
- Berridge, W., Lynch, J., Makawi, R., & Waal, A. D. (2022). *Sudan's Unfinished Democracy: The Promise and Betrayal of a People's Revolution*. UK: Oxford University Press.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. London: Sage Publications.
- Eltayeb, A. F. (2022, November 22). *Back to Barracks: Building Democracy after the Military Coup in Sudan*. Dipetik April 20, 2024, dari European Council on Foreign Relations: <https://ecfr.eu/publication/back-to-barracks-building-democracy-after-the-military-coup-in-sudan/>
- Hassan, M., & Kodouda, A. (2019). Sudan's Uprising: The Fall of a Dictator. *Journal of Democracy*, 30(4), 89-103. Diambil kembali dari <https://www.journalofdemocracy.org/articles/sudans-uprising-the-fall-of-a-dictator/>
- Human Right Watch. (2019, November 17). *They were shouting 'Kill them': Sudan's violent crackdown on protesters in Khartoum*. Dipetik April 20, 2024, dari Human Right Watch: <https://www.hrw.org/report/2019/11/18/they-were-shouting-kill-them/sudans-violent-crackdown-protesters-khartoum>
- Idris, A. a.-B. (2019, November 26). *Inqilab al-Inqadh...jadal al-muhakama wa'l tawqif*. Dipetik April 20, 2024, dari al-Rakoba: <https://www.alrakoba.net/31347406/انقلاب->

- المحاكمة والتو-الإنقاذ-جدل-#google_vignette
- International Crisis Group. (2023, September 7). *Podcast Africa: The Horn (Season 5)*. Dipetik April 18, 2024, dari International Crisis Group: <https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/horn>
- Izzurrahman, M. H., & Basyar, M. H. (2022). Oligarchy and the Postponement of 2020 Elections in Sudan after the Fall of President Bashir. *Jurnal Penelitian Politik*, 19(1), 23-40.
- Koselleck, R. (2006). Crisis. *Journal of the History of Ideas*, 67(2), 357-400.
- Lynch, C., & Gramer, R. (2021, November 16). *The World Food Program's Freelance Diplomacy*. Dipetik April 20, 2024, dari Foreign Policy: <https://foreignpolicy.com/2021/11/16/world-food-program-david-beasley-sudan/>
- Margolis, J. E. (2010). Understanding Political Stability and Instability. *Civil Wars*, 12(3), 326-345.
- McGowan, P. (2003). African military coups d'état, 1956–2001: Frequency, trends and distribution. *Journal of Modern African Studies*, 41(3), 39-70.
- Merkel, W. (2014). Is There a Crisis of Democracy? *Democratic Theory*, 1(2), 11-25.
- Oestericher, B. (2022, October 3). *Helping Put Sudan's Democratic Transition*. Dipetik April 18, 2024, dari Foreign Policy Researcher Institute: <https://www.fpri.org/article/2022/10/helping-put-sudans-democratic-transition-back-on-track/>
- Patey, L. (2023, March 29). *Oil, Guns and Gold: The Violent Politics of Sudan's Resource Booms*. Dipetik April 20, 2024, dari World Peace Foundation: <https://worldpeacefoundation.org/blog/oil-guns-and-gold-the-violent-politics-of-sudans-resource-booms/>
- Sikainga, A. A. (2002). *ity of Steel and Fire': A Social History of Atbara, Sudan's Railway Town, 1906–1984*. Woodbridge: James Currey.
- Weiffen, B. (2018). The crisis of democracy: Conceptualization and Empirical Assessment (with Special Consideration of Europe). *IPSA World Congress* (hal. 1-19). Brisbane: Department of Political Science, University of São Paulo.
- Xinhua. (2019, September 10). *Sudan gov't announces 10 priorities for transitional period*. (Xuxin, Editor) Dipetik April 20, 2024, dari Xinhua: http://www.xinhuanet.com/english/2019-09/10/c_138381809.htm
- Young, J. (2012). *The Fate of Sudan: The Origins and Consequences of a Flawed Peace Process*. London: Zed Books.